

**PERJANJIAN UNTUK PENGOPERASIAN TERMINAL DI PELABUHAN
TANJUNG PRIOK PADA PT. (PERSERO) PELABUHAN
INDONESIA II CABANG TANJUNG PRIOK**

Muh Isnanto¹ Nindyo Pramono² Antari Innaka T³
Program Studi Hukum Bisnis
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari Perjanjian Untuk Pengoperasian terminal di Pelabuhan Tanjung Priok pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk pada ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai Perseroan Terbatas, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II mempunyai kewenangan untuk mengikatkan diri dengan pihak lain, dimana yang memiliki kewenangan tersebut adalah direktur, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan dari perikatan dibuktikan dengan perjanjian tertulis, dimana perjanjian tersebut tunduk pada KUH Perdata buku ke III yang mengatur mengenai perikatan. Salah satu perjanjian yang dibuat antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan pihak lain adalah perjanjian untuk pengoperasian terminal, dimana salah satu obyek dalam perjanjian tersebut adalah panjang dermaga. Pada pelaksanaan perjanjian, ditemui adanya permasalahan yang disebabkan oleh kekurangan panjang dermaga yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian. Penyelesaian permasalahan tersebut didasarkan pada isi perjanjian, dan dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut tidak efektif karena memerlukan waktu yang lama dan menyebabkan ketidakpastian bagi para pihak.

¹ . PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II

² . Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

³ . Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

THE AGREEMENT OF THE TERMINAL OPERATION ON TANJUNG
PRIOK PORT AT PT. (PERSERO) PELABUHAN
INDONESIA II - TANJUNG PRIOK BRANCH

Abstract

Muh Isnanto¹ Nindyo Pramono² Antari Innaka T³
Master of Business Law Program
Post-Graduate Program of Gadjah Mada University

The aim of this research is to find out the implementation of the agreement of the terminal operation at PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Tanjung Priok Branch.

The result of the research proved that PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II as a state owner enterprise obeyed to the general stipulation, that has been valid on the Law No. 1/1995 about Partnership. As the Partnership, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II had the authority to bound to the other party, whereas the one who had the right to self-bound wa a director, to and in the name of Partnership, as stated on the Law No. 1/1995 about Partnership. The implementation of the boundary has proved in a written agreement, whereas the agreement obeyed to the *Burgerlijk Wetboek*, the 3th book, that managed about boundary. One of the agreement made by PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II with the other party was the agreement of the terminal operation, whereas on of the agreement's object wa the length of the quay. In the implementation of the agreement, there was a dispute caused by the less of quay length. It was not appropriate with the agrrement. The settlement would be done based on the content of agreement, and in reality the dispute settlement was not effective because required o long time and caused the uncertainty for the parties

Key Words : Agreement, Dispute.

¹ . PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II

² . Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta

³ . Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta